

**PENETAPAN TARIF PENUMPANG MOBIL TRAVEL RESMI  
DAN TIDAK RESMI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi pada Mobil Travel Trayek Bakauheni-Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1 dalam Ilmu Syariah.

**Oleh:**

**Yurika**

**NPM : 1621030191**

**Jurusan : Hukum Ekonom Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

**PENETAPAN TARIF PENUMPANG MOBIL TRAVEL RESMI  
DAN TIDAK RESMI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi pada Mobil Travel Trayek Bakauheni-Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1 dalam Ilmu Syariah.

Oleh:

**Yurika  
NPM : 1621030191**

**Jurusan : Hukum Ekonom Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I: Dr. Iskandar Syukur M.A**

**Pembimbing II: Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

## ABSTRAK

Kegiatan upah-mengupah hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu yang dapat dilakukan adalah upah-mengupah dalam tarif mobil travel resmi dan tidak resmi pada trayek Bakauheni-Bandar Lampung. Upah-mengupah adalah suatu perjanjian dimana satu pihak dengan pihak yang lainnya sudah meyetujui akan adanya perjanjian dalam hal upah-mengupah tersebut, didasari mau sama mau dan sama-sama setuju, dengan kesepakatan pembayaran satu harga yang telah disanggupi oleh pihak tersebut.

Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah 1) bagaimana praktik penetapan tarif penumpang mobil Travel resmi dan tidak resmi pada Trayek Bakauheni-Bandar Lampung? 2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan tarif penumpang mobil Travel resmi dan tidak resmi pada Trayek Bakauheni-Bandar Lampung? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan praktik penetapan tarif Travel resmi dan tidak resmi pada Travel Trayek Bakauheni-Bandar Lampung. 2) untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang penetapan tarif Travel resmi dan tidak resmi pada Trayek Bakauheni-Bandar Lampung.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif *analisis*, dengan *analisis* sumber data primer yang diperoleh dari wawancara kepada supir travel resmi dan tidak resmi dan penumpang travel resmi dan tidak resmi, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah supir travel resmi dan tidak resmi dan penumpang travel resmi dan tidak resmi pada trayek Bakauheni-Bandar Lampung yang berhubungan dengan penetapan tarif yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Analisis dengan melakukan analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode cara berfikir *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa kesepakatan yang terjadi antara penumpang dan supir travel dilakukan secara lisan dengan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun, syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk penentuan harga yang telah ditentukan berdasarkan jarak yang akan di tuju oleh penumpang tersebut, pihak supir dan penumpang telah sama-sama menyepakati hal tersebut. Untuk menghindari pelanggaran isi perjanjian ada baiknya sebelum menyepakati perihal tarif travel pihak penumpang benar-benar telah mengetahui bahwa apa yang telah disepakati itu tidak akan ada perubahan lagi, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan atau kesalahpahaman nanti di kedepannya.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Tet Kol H. Endro Suratmin Sukarama-1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

**Nama : Yurika**

**NPM : 1621030191**

**Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**

**Fakultas : Syariah**

**Judul Skripsi : Penetapan Tarif Penumpang Mobil Travel Resmi dan Tidak Resmi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Mobil Travel Trayek Bakauheni-Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iskandar Syukur, M.A**  
**NIP. 19660330192031002**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 197504282007101003**

**Ketua Jurusan**

**Khoirudin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENETAPAN TARIF PENUMPANG MOBIL TRAVEL RESMI DAN TIDAK RESMI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Mobil Travel Trayek Bakauheni-Bandar Lampung)”**.

Disusun Oleh : Yurika, NPM. 1621030191, Jurusan: Muamalah. Telah diujikan

Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar

Lampung Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 03 September 2020.

TIM MUNAQSAH

Ketua : Juhrotul Khulwah, M.S.I

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

M. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002



## MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ  
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Abdullah Ibnu Umar Katanya: Rasulullah Saw bersabda,

”Berikanlah kepada seseorang pekerja upahnya  
sebelum keringatnya kering”.

(H.R Ibnu Majah)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II.No.2443 (Dar Itha' al Kutub-  
'Arabiyah,2009),h.816.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Ali Hasan dan Ibunda Dahlia tercinta yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup dan terimakasih selalu ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh sayang serta senantiasa mendoa'kan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kemurahan rezeki keberkahan umum kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya Rabbal'amin.
2. Kakakku (Vera Lidya) dan seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT membalas dengan keridhoan yang liar biasa.
3. Almamaterku tecinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah tempat penulis menimba ilmu.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis di anugerahi oleh Ayahanda dan Ibunda dengan nama Yurika. Dilahirkan pada tanggal 17 Juli 1998 di Bandar Lampung. Putri ketiga dari tiga bersaudara.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. Pendidikan di TK Al-Hikmah Bandar Lampung tamat pada tahun 2004
2. Selanjutnya Pendidikan di SD Negeri 1 Wayhalim Permai tamat pada tahun 2010
3. Lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 24 Bandar Lampung tamat pada tahun 2013
4. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung tamat pada tahun 2016
5. Selanjutnya melanjutkan di perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung Mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2016



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya atas penyelesaian penulisan penelitian dalam skripsi ini.

Shalawat serta salam diperuntukan kepada nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga serta para pengikutnya taat pada ajaran Islam yang sempurna.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta khusus dan hormat penulis mengucapkan terimakasih untuk dihaturkan kepada:

1. Dr. KH Khairuddin Tahmid, MH, Selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Iskandar Syukur, M.A. Selaku Pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini.
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
4. Dosen Fakultas Syariah dan staff serta karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan yang baik.
5. Keluarga besarku yang tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian ini.
6. Sahabat perjuangan Annisa Suwandy, Dinda Bestari, Reza Ayu yang senantiasa ikut berjasa dalam menggapai segala cita-citaku di Kampus UIN Raden Intan Lampung.

7. Rekan-rekan ku khusus nya Mahasiswa dan Mahasiswi Muamalah kelas D  
seperjuangan angkatan 2016 di Fakultas Syariah UIN raden Intan Lampung.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pendidik atau masyarakat  
luas, kapan dan dimana saja serta dapat diamalkan oleh siapa saja, kritik serta  
saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Mei 2020

Penulis

**Yurika**  
**1621030191**





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian .....	10

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Upah Mengupah dalam Hukum Islam .....	15
1. Pengertian Ijarah.....	15
2. Dasar Hukum Ijarah .....	17
3. Rukun dan Syarat Ijarah .....	21
4. Macam-Macam Ijarah .....	26
5. Standar Upah Menurut Islam.....	27
B. Tinjauan Pustaka .....	31

### BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum .....	35
1. Bakauheni .....	35
2. Kota Bandar Lampung .....	36
3. Tujuan dari dibentuknya CV dari masing-masing Travel .....	42
4. Owner (kepemilikan) .....	43
B. Penetapan Tarif Penumpang Pada Mobil Travel Resmi dan Tidak Resmi Trayek Bakauheni-Bandar Lampung .....	51
1. Penetapan Tarif Pada Penumpang Mobil Travel Bakauheni-Bandar Lampung .....	51
2. Subjek dan Objek Upah-Mengupah .....	52
3. Tempat dan Tujuan .....	53
4. Prosedur dan Mekanisme .....	54

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktek Upah-Mengupah Pada Penetapan Tarif Penumpang Mobil Travel Resmi dan Tidak Resmi Trayek Bakauheni-Bandar Lampung .....	59
B. Penetapan Tarif Penumpang Mobil Travel Resmi dan Tidak Resmi Dalam Tinjauan Hukum Islam di Bakauheni-Bandar Lampung.....	64

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Rekomendasi .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMIRAN**





## DAFTAR TABLE

Tabel 1	Data Angkutan Travel Trayek Resmi Bakauheni-Bandar Lampung.....	38
Tabel 2	Data Nama-Nama Supir Travel Resmi Bakauheni-Bandar Lampung.....	41
Tabel 3	Data Jumlah Penumpang dari Bakauheni-BandarLampung.....	43
Table 4	Daftar Lokasi Tunggu Travel Di Bandar Lampung-Lampung Selatan .....	44
Table 5	Perkembangan Kinerja Angkutan di Provinsi Lampung Tahun 2016 S/D 2020 .....	45
Table 6	Data Angkuta Travel Tidak Resmi Bakauheni-Bandar Lampung.....	47
Table 7	Data Nama-Nama Supir Travel Tidak Resmi Bakauheni-Bandar Lampung.....	49
Table 8	Daftar Tarif Travel Resmi dan Tidak Resmi Bakauheni-Bandar Lampung.....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penjelasan judul diperlukan dalam upaya memberikan batasan-batasan yang jelas dan pasti, dengan meletakkan masing-masing kata sesuai dengan maknanya. Dari sini kemudian ditarik satu pengertian sesuai dengan penulis maksudkan, sehingga dengan penjelasan ini dapat dihindari kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian yang akan penulis lakukan berjudul **“Penetapan Tarif Travel Resmi dan Tidak Resmi dalam Tinjauan Hukum Islam ( Studi pada Travel Trayek Bakauheni-Bandar Lampung)”**

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

**Penetapan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus .<sup>1</sup>

**Tarif** adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang ketika masuk atau keluar batas negara.

**Travel** adalah pergerakan orang antara lokasi geografis yang relatif jauh dan dapat melibatkan perjalanan dengan berjalan kaki, mobil, kereta api, kapal, pesawat.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Keempat, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470



**Resmi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah di tetapkan (diumumkan, disahkan) oleh pemerintah atau instansi yang bersangkutan.<sup>2</sup>

**Tidak Resmi** adalah sesuatu yang tidak di umumkan atau tidak disahkan nya mengenai suatu ketetapan.

**Tinjauan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau , pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).

**Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah.<sup>3</sup>

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut :

### 1. Alasan Objektif

Perkembangan transportasi di Indonesia mulai dirasakan setelah bangsa asing berdatangan ke Indonesia. Sebelum masyarakat di Indonesia hanya menggunakan sarana transportasi hewan, seperti kuda, lembu, dan sapi untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ketempat yang lain. Setelah datang nya bangsa asing transportasi di Indonesia mulai menggunakan alat gerobak yang beroda. Kemudian perkembangan transportasi Indonesia semakin maju ketika Indoneisa mulai dikuasai oleh pemerintah colonial belanda. Pada masa ini alat-alat transportasi sudah menggunakan mesin-mesin pengangkut .

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h.1470.

<sup>3</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17-18

Terdapat perbedaan tarif yang ditentukan oleh supir ini adanya ketidaksesuaian pada saat menaiki travel tersebut dan pada saat turun dari travel tersebut. Dalam praktek perbedaan tarif travel tersebut dianggap perlu diteliti lebih lanjut dengan menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.

## 2. Alasan Subjektif

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini termasuk salah satu bidang studi ilmu yang penulis pelajari di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Adanya referensi atau literatur dapat mempermudah penulis.

### C. Latar Belakang Masalah

Perkembangan transportasi di Indonesia mulai dirasakan setelah bangsa asing berdatangan ke Indonesia. Sebelumnya masyarakat di Indonesia hanya menggunakan sarana transportasi hewan seperti kuda, lembu dan sapi untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah datangnya bangsa asing transportasi di Indonesia mulai menggunakan alat gerobak yang beroda. Kemudian perkembangan transportasi di Indonesia semakin maju ketika Indonesia mulai dikuasai oleh pemerintah colonial Belanda. Pada masa ini alat transportasi sudah menggunakan mesin-mesin pengangkut. Kedatangan bangsa-bangsa Belanda membawa peralatan transportasi data yang sudah modern.<sup>4</sup>

Kemajuan transportasi di Indonesia berlanjut ketika pemerintah Inggris menjadi penguasa. Pada masa itu Indonesia dipimpin oleh Raffles yang kemudian mengembangkan sistem transportasi di Indonesia dengan membangun jalan raya

---

<sup>4</sup> Hendrie Anto M.B, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003),.

yang membentang dari Anyer sampai Panarukan. Di samping itu pemerintah Rafles juga membangun stasiun-stasiun kereta api di daerah-daerah kemajuan transportasi pada masa pemerintahan Inggris ini ditujukan untuk memperlancar distribusi hasil-hasil produksi industry Inggris ke Indonesia.

Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia terus berlanjut sampai Indonesia merdeka. Pemerintah mengembangkan teknologi transportasi didorong oleh kebutuhan manusia akan transportasi. Dengan adanya transportasi dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Secara umum pemerintah Indonesia pada masa itu meningkatkan teknologi transportasi karena dengan adanya fungsi transportasi yaitu, pertama memperlancar hubungan, pengangkutan dan interaksi antar desa, antar kota, antar wilayah, antar pulau, bahkan antar Negara. Hal ini dilakukan karena keadaan wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh perairan. Kedua, memperlancar mobilitas arus perpindahan penduduk, distribusi barang dan jasa serta informasi ke seluruh pelosok tanah air.

Upah merupakan motivasi utama manusia dalam bekerja. Karena upah adalah alat dalam mewujudkan kebutuhan manusia. Upah diartikan pula sebagai hak pekerja yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Tetapi penetapan tarif transportasi travel yang resmi dan tidak resmi ini untuk angkutan Bakauheni-Bandar Lampung adanya ketidaksesuain antara upa dalam kedua jenis travel tersebut. Menurut para penumpang tarif ongkos travel yang resmi malah terkadang tidak sesuai, semula pada saat di tawarkan agar kita



naik travel tersebut sang supir menawarkan harga Rp 40.000 tetapi pada saat penumpang turun sang supir malah meminta harga Rp 50.000 disitulah terdapat ketidaksesuaian ongkos dari pihak travel yang tidak resmi. Sedangkan menurut para penumpang travel yang resmi lah yang terkandung tidak bermasalah, mereka memberikan tarif yang sesuai dengan harga awal.<sup>5</sup>

Disini lah masalah yang sering penumpang keluhkan, mereka merasa dirugikan atas ketidaksusuaian tarif yang diberikan oleh pihak travel. Mengapa harus berbeda-beda seperti itu, seharusnya harga awal yang sudah mereka tetapkan itulah yang mereka pinta pula pada saat penumpang tersebut turun dari travel. Dengan begitu penumpang tersebut tidak akan merasa dirugikan.

Jika dengan cara tidak sesuai seperti itu pula lah yang terkadang memberikan dampak buruk bagi travel itu sendiri, di karenakan dari mulut ke mulut penumpang satu ke penumpang yang lain nya yang memberi tahu bahwa travel tersebut harga nya tidak sesuai dengan apa yang di berikan sejak awal dan pada saat mereka turun, dengan begitu membuat penumpang lain enggan untuk menaiki travel terseut dikarenakan mereka takut dirugikan.

Dari berita yang didapat langsung dari lapangan yaitu pelabuhan Bakauheni memang banyak travel-travel yang menawarkan jasa mereka untuk mengangkut penumpang yang baru turun dari kapal untuk menuju ke tempat tujuan mereka. Disini tetapi bukan supir travel itu sendiri yang menawarkan penumpang tersebut, melaikan ada calo sendiri yang menawarkan penumpang-penumpang tersebut, dengan cara mereka tarik-tarik agar penumpang tersebut mau

---

<sup>5</sup> Chairumaan Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004 ) h. 203.

menaiki travel tersebut. Para calon ini lah terkadang yang semau-mau mereka mengasih tarif untuk ongkos travel tersebut, agar jika travel tersebut penuh ia akan mendapatkan seseran dari supir travel itu sendiri .

Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara. Pengupahan atau *ijarah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (bayaran). Dengan kata lain, *ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang menyewakan) oleh seseorang mustajir (orang yang menyewa), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang ajir.

Pembayaran upah disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Abd. Allah Ibn Umar Katanya: Rasulullah Saw bersabda, "Berikanlah kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering". (H.R Ibnu Majah)<sup>6</sup>

Hadis di atas menggambarkan bahwa prinsip utama pengupahan adalah keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukan nya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana

---

<sup>6</sup>Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II.No.2443 (Dar Ihya'al Kutub-'Arabiyah,2009),h.816.

upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Dalam penetapan tarif transportasi, yang harus diperhatikan adalah mengenai kesepakatan di awal tarif yang telah ditentukan oleh supir dan disepakati oleh penumpangnya, jangan sampai termasuk dalam gharar. Gharar yaitu keraguan atau tipuan tindakan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Kurangnya pemahaman akan adanya konsep bermuamalah yang sesuai dengan syariah, menjadi salah satu alasan maraknya praktik tersebut. Namun ketika sudah paham pun, sering dihindarkan karena terkendala dengan keadaan keuangan yang tidak memadai. Sehingga, pungutan tarif pada setiap penumpang lah yang mereka harapkan.

Belum adanya kesadaran yang penuh terhadap hukum dalam bermuamalah pada kehidupan sehari-hari, hal seperti disebutkan di atas masih dianggap sebagai hal yang masih biasa diberi toleransi. Dengan demikian, temuan yang penulis dapatkan membuat penulis ingin menganalisis dan mengkomparasikan dengan segala peraturan yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat masalah penetapan tarif travel resmi dan tidak resmi dalam hukum islam dan hukum positif dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian. Dari latar belakang itulah penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang



menarik judul “Penetapan Tarif Travel Resmi dan Tidak Resmi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif yang ada di Bakauheni Lampung Selatan”.

#### **D. Fokus Penelitian**

1. Fokus penelitian adalah Penetapan Tarif Travel Resmi dan Tidak Resmi dalam Tinjauan Hukum Islam yang ada di Terminal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Penetapan Tarif Travel Resmi dan Tidak Resmi dalam Tinjauan Hukum Islam yang ada di Terminal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan tarif penumpang mobil Travel resmi dan tidak resmi pada Trayek Bakauheni-Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan tarif penumpang mobil Travel resmi dan tidak resmi pada Trayek Bakauheni-Bandar Lampung?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan praktik penetapan tarif Travel resmi dan tidak resmi pada Travel Trayek Bakauheni-Bandar Lampung

- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang penetapan tarif Travel resmi dan tidak resmi pada Trayek Bakauheni-Bandar Lampung

## G. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi para akademisi yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai bentuk kegiatan lain yang diindikasikan memiliki kemiripan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Terminal

Pelabuhan Bakauheni, diharapkan dapat menjadi acuan bagi penetapan harga pada Travel yang Resmi dan Tidak Resmi.

#### b. Bagi penulis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### c. Bagi peneliti berikutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti mengenai penetapan Tarif Travel Resmi dan Tidak Resmi

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau di responden.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.<sup>7</sup> Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan

---

<sup>7</sup> Moh Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006), h. 10.

## 2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari penetapan tarif travel yang resmi dan tidak resmi. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).<sup>8</sup> Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam Penetapan Tarif Travel Resmi dan Tidak Resmi dalam Tinjauan Hukum Islam.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqh, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

---

<sup>8</sup> Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 73.



### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu;

a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>9</sup> Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan secara fenomena yang terjadi dilapangan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pelaku penetapan tarif travel resmi dan tidak resmi .

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.<sup>10</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan penetapan tarif travel resmi dan tidak resmi.

---

<sup>9</sup>Moh. Nazir, *Metodelogi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154.

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah supir, kantor travel dan penumpang travel tersebut.

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>11</sup> Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud sampling disini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*). Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjek besar maka diambil 10-15% atau 20-25%. Sampel yang diambil oleh penulis sebanyak 15% dari jumlah populasi yaitu 7 supir travel dan 12 penumpang travel pada trayek Bakauheni-Bandar Lampung.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

---

<sup>11</sup> Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). H. 336.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Deduktif dan Induktif. Metode deduktif yaitu mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.<sup>12</sup> Sedangkan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>13</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan tarif travel resmi dan tidak resmi.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 137.

<sup>13</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h. 183.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Upah Mengupah Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian *Ijarah*

Upah atau sering disebut dengan kata *Ijarah*. Berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa adalah *al-‘iwadh* yang mempunyai arti yaitu ganti dan upah. Dalam arti luas *ijarah* merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan suatu imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang atau jasa apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.

###### a. Secara *terminologi*

Ada beberapa definisi mengenai *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh.

###### b. Menurut Ulama Syafiyah

*Ijarah* adalah Akad artinya “...suatu manfaat yang diketahui kebolehan nya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehan nya.”<sup>14</sup>

###### c. Menurut Hanafiyah

*Ijarah* adalah Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Ibid, h. 113.

<sup>15</sup>Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.



d. Menurut Malikiyah dan Hanabilah

*Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu...<sup>16</sup>

e. Menurut Sayyid Sabiq

*Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.<sup>17</sup>

f. Menurut Ahsin W. Alhafidz

Dalam buku Kamus Fiqh menyebutkan *ijarah* adalah "...pemindahan hak-hak guna atas jasa ataupun barang, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri..."<sup>18</sup>

Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna nya. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk di tempati selama dia kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti seorang karyawan yang berkerja di sebuah toko dan di bayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*. Dalam konteks subtransi pembahasan ini yang dimaksud dengan *ijarah* adalah upah.

Definisi upah menurut KBBI "...uang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk

---

<sup>16</sup>Ibid, h. 120

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIII* (Bandung: Al-Ma'aruf, 1987), h. 15

<sup>18</sup>Ahsan W Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 87

mengerjakan sesuatu. Pembalasan tersebut dapat disebut dengan gaji atau imbalan...”<sup>19</sup>

“Menurut Afzalur Rahman adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga diri tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.”<sup>20</sup>

Kalau diperhatikan secara mendalam definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab dan para ahli di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *ijarah* antara lain:<sup>21</sup>

- a. Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan Kabul.
- b. Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.
- c. Adanya imbalan tertentu.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Hampir semua Ulama Fiqh sepakat “...*Ijarah* disyariatkan dalam islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang menyepakati *Ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat)...”<sup>22</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, As-sunnah, dan Ijma.

<sup>19</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1108

<sup>20</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). h.361

<sup>21</sup>Herianto, *Ijarah dalam Islam*, (On-line), tersedia di: <https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/> (10 februari 2020)

<sup>22</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Jus III*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A Haris Abdullah, (Semarang: Asy-syifa, 1990), h. 194-196

a. Landasan al-Qur'an

Firman Allah berikut ini:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S An-Nahl [16] : 97)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh dengan baik, baik lelaki maupun perempuan maka akan diberikan kehidupan yang baik pula sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan dalam menyelesaikan pekerjaannya untuk mendapatkan upah. Kemudian landasan *ijarah* pada surat An-Nahl ayat ke 90. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl [16] : 90)

Berdasarkan ayat ini, maka diperbolehkan akad upah-mengupah (*ijarah*) “...ayat ini berupa perintah untuk memberikan upah dan ditujukan

kepada para suami yang tetap memberikan nafkah, namun sejatinya bahwa akad upah-mengupah diperbolehkan dalam hukum islam...”

Al-Qur'an surat Al-Qashash [28] ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبْتَكِّحَ إِحْدَىٰ أَبْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَآجُرَنِي ثَمَنِي  
 حَبْجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ  
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja(pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya Allah aku mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik.”(Q.S Al-Qashash [28] ayat 26-27)<sup>23</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

<sup>23</sup> Ibid. h. 37

b. Landasan As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ مَالِقِيَا مَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ  
(رواه البخاري)<sup>٢٤</sup>

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Bersabdah: Allah ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”.(HR. Bukhari).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ  
(رواه البخاري ومسلم)<sup>٢٥</sup>

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabdah, “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dua hadis di atas menjelaskan tentang memberikan upah kepada pekerja atau buruh “...hendaknya memberikan upah kepadanya sebelum keringatnya mengering atau dengan kata lain, harus segera membayar upahnya bila kerjanya telah selesai dan hendaknya memberitahukan kepadanya upah yang akan diterimanya ketika ia masih dalam kerjanya..”

Segara membayar upah pekerja hukumnya wajib berdasarkan hadis di atas,

<sup>24</sup> Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, no 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002), h.531.

<sup>25</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* ( Jakarta: Gramedia, 2017), h.105.



dan menangguk-nanggukannya hukumnya tidak boleh. Demikian pula memberikan upah yang akan diterimanya, wajib pula hukumnya.<sup>26</sup> Ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi SAW di atas, "...bahwa adanya kebolehan akad *ijarah* dengan objek transaksi tenaga seseorang, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat pada kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang yang memiliki harta namun tidak mempunyai waktu..." Dan disisi lain ada orang yang tidak memiliki harta tetapi mempunyai banyak waktu. Dengan adanya akad *ijarah* yang objek transaksinya tenaga orang maka orang yang mempunyai harta bisa meminta bantuan orang yang tidak mempunyai harta dengan imbalan diberikannya upah.

c. Landasan Ijma'

Para ulama bersepakat bahwa "...*ijarah* dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang bisa membantah Kesepakatan (Ijma') ini.."

<sup>27</sup>Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap sebagai dilarangnya *ijarah*.<sup>28</sup>Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan "...yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*..."

---

<sup>26</sup>Sayyid Ahmad Al-Hasyim, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits (Hadis-Hadis Pilihan Berikut Penjelasannya)*, Terjemahan Moch Anwar dkk (Bandung: Sinar Baru, 1993, Cet. I), h.151-152

<sup>27</sup>Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 117.

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah Jilid XIII* (Bandung: Al-Ma'aruf, 1987), h. 18.

Maka berdasarkan nash al-Quran, sunnah (hadits), dan Ijma' diatas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* adalah boleh dilakukan dalam Islam, dengan prinsip kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan syara'.

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, "...terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut, sehingga itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membatakannya..." Misalnya, sebuah toko terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu, pondasi, lantai, dinding, tiang, atap dan seterusnya. Dalam konsep islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut juga sebagai rukun.

Ulama Hanafi mengatakan, "...rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja. Selain ijab dan qabul, menurut Hanafi adalah syarat. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *ijarah* ada tiga, yaitu *Ujrah* (Imbalan berupa Upah atau manfaat), *Aqid* (orang yang berakad), *Sighat* (Ijab dan qabul)..."<sup>29</sup>

#### a. *Ujrah* (Upah)

Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja (*ajir*) tersebut. Syarat-syaratnya pun sama seperti jual beli, harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa/upah (*ijarah*) yaitu:

---

<sup>29</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h.231

1) Upah harus dapat dimanfaatkan

Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tidak sah untuk dijadikan upah. Karena dianggap tidak berharga. Seperti daging babi atau anjing, karena kedua daging tersebut tidak bermanfaat menurut islam.

2) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci

Akad ijarah tidak sah bila upah (bayarannya) adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau *khamar* Tidak sah pula benda jika upahnya benda terkena najis dan tidak mungkin di sucikan.

3) Upah harus diketahui

Secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi sejak awal. Dalam artian tidak mengandung *gharar*. Syariat ini disepakati oleh para ulama. Syarat ini diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli. Ada syarat yang tidak masuk dalam rukun, yaitu tidak boleh memperkerjakan pekerjaan, seperti: memperkerjakan seseorang untuk sholat kemudian objeknya tidak mengandung riba dan tidak ada unsur penipuan.<sup>30</sup> "...melakukan transaksi, prinsip yang harus di junjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai dengan takarannya..." Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi

---

<sup>30</sup>Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001 h. 128

timbangan tidak dibenerkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.

4) Upah harus dapat diserahkan

Dengan ketentuan upah berada dibawah kuasa orang yang berakad.

b. *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad meliputi *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* sebagai orang yang menggunakan tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau orang yang mempunyai barang sewaan, *musta'jir* sebagai orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu.<sup>31</sup> *Mu'jir* terdiri dari *mu'jir* khas, yaitu seseorang memprkerjakan orang pada pekerja tertentu dan *mu'jir musytara*, yaitu seseorang yang memperkerja orang untuk kepentingan orang banyak.<sup>32</sup>

Syarat terjadinya akad (*al-inqad*) dari orang yang berakad. Menurut Hanafiyah, "... '*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh dengan ketentuan diizinkan walinya..."<sup>33</sup> Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, mensyaratkan baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membendakan. Dinyatakan tidak sah.<sup>34</sup> "...demikian syarat terjadinya akad yaitu, Baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan

<sup>31</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h.170.

<sup>32</sup> Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 164.

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'I *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001. h. 125.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIII* (Bandung: Al-Ma'aruf, 1987), h. 19.

harta)<sup>35</sup> dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad...” Dalam hal kerelaan kedua belah pihak, perintah dan nash al-Qur’an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ  
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta-kamu yang berputar dikalangan kamu dengan cara yang bathil. Kecuali dengan jalan dagang yang ada saling rela diantara kamu. Dan, janganlah kamu membunuh diri kamu karena sesungguhnya Allah Maha belas kasih kepadamu. Dan, barang siapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiyaan, maka kelak akan Kami masukkan dia ke dalam api neraka.” (An-Nisa [4]: 29-30).

Ayat ini memberikan isyarat kebolehan transaksi muamalah, jika transaksi tersebut saling rela kedua belah pihak dan tidak menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak yang lain. Syarat kedua dari kata janganlah membunuh diri-diri kamu, menurut ahli-ahli tafsir pengertian yang sesuai dengan proporsinya yaitu, arti pertama, satu sama lain tidak boleh saling membunuh, dan arti kedua, tidak boleh membunuh diri sendiri dengan tenaga sendiri. “...ayat ini memberikan pengertian bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri...” Sedangkan menurut Afzalur Rahman, suatu transaksi bisnis dinyatakan haram atau cacat apabila disertai kondisi yang menguntungkan salah satu pihak, atau

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 118.



menimbulkan ketidakpuasan dalam kontrak tersebut dan menghindari eksploitasi salah satu pihak. Kerelaan kedua belah pihak ini dapat diartikan tidak adanya paksaan pada transaksi.

“Erwendi Tarmidzi dalam bukunya yang berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer bahwa akad *Iz'an* (keterpaksaan), bahwa jika tidak ada pilihan lain untuk memilih dalam hal ini mengandung kezaliman, maka perlu adanya campur tangan *Ulil Amri* atau pemerintah untuk menetapkan harga yang proporsional”

#### c. *Shighat*

“ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijan dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*”.

Menurut hukum perikatan Islam, “...Ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu...”<sup>36</sup> “...qabul adalah sesuatu pernyataan yang diucapkan dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab...”<sup>37</sup> Syarat-syarat Ijab qabul pada *ijarah* yaitu, menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan, dibuat sebelum pekerjaan itu dilakukan dan tidak boleh disangkutkan dengan urusan lain dan terjadi kesepakatan bersama.

#### 4. Macam-Macam Ijarah

Seperti yang telah disebutkan di awal, akad *ijarah* terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan (*jasa*). *Ijarah* bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa ruko, kendaraan dan

<sup>36</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.63

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 117

pakaian. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan maka para Ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadiam objek sewa-menyewa.<sup>38</sup>

“...*Ijarah* bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjaan seseorang untuk melakukan pekerjaan...” *Ijarah* seperti ini, menurut para ulama boleh hukumnya, apabila jenis pekerjaan ini jelas, seperti buruh pabrik, tukang jait, dan pedagang. “...beberapa bagian *ijarah* pada pekerjaan, seperti, yang bersifat pribadi (*ijarah khas*), yaitu menggaji pembantu rumah tangga...” Ada yang bersifat serikat(*ijarah musytarik*), seperti sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.<sup>39</sup>

## 5. Standar Upah Menurut Islam

Masalah upah begitu penting dan dampaknya sangat luas, jika para pekerja tersebut tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan langsung memperngaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi yang ada pada Negara.

Sebagaimana kerja “...dalam Islam mengharuskan bahwasannya gaji dan bayaran serta spesifikasi dari sebuah pekerjaan yang ada akan dikerjakan hendaknya jelas, disetujui pada saat mengadakan kesepakatan awal...” Ini juga mengharuskan bahwa gaji yang telah ditentukan, dan bayaran-bayaran

<sup>38</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media, Cet ke-II) h.236

<sup>39</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.134.

lain hendaknya dibayar saat pekerjaan ini telah selesai tanpa sedikitpun penundaan dan pengurangan.<sup>40</sup> Di sisi lain, Islam juga memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menentukan upah/harga dengan berbagai macam nilai nominal, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>41</sup>

Hal yang sama disampaikan juga oleh Yusuf Qardhawi bahwa pedoman umum tentang bekerja haruslah sesuai dengan tuntutan Islam. Sebagaimana dalam islam mempunyai aturan pemisah antara yang boleh dan tidak boleh dengan menitikberatkan kemaslahatan umum, "...dengan demikian semua transaksi yang dilakukan dalam rangka mencari uang harus menghasilkan manfaat kepada seseorang tanpa menjatuhkan orang lain dengan saling merelakan dan adil..."<sup>42</sup> Lalu dengan itu, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak yang lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surah al-Baqarah sebagai berikut :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” ( Q.S Al-Baqarah [2]: 279)

<sup>40</sup>Mustaq Ahmad , *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), h.101.

<sup>41</sup>Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah (Ayat-ayat Al-Quran yang Berdimensi Ekonomi)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) h. 34

<sup>42</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 199

Perjanjian (tentang upah) antara kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan. Sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. "...Terjadinya penentuan upah yang dilematis dari kedua belah pihak antara para pekerja dan orang yang memperkerjakan, mengingat upah berkaitan erat dengan konsep kerelaan kedua belah pihak, yang berpotensi terjadinya kedzaliman pada salah satu pihak..." Yang dimana pekerja menginginkan upah yang layak dalam standarisasi dirinya, dan majikan meminimalisir biaya dalam pemberian gaji pekerja untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, dengan begitu penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka yang tidak diperoleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh para pekerja untuk membayar upah melebihi dari kemampuannya.

"Menurut Afzalur Rahman, yang berdasarkan prinsip keadilan, Standarisasi upah dalam Islam ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara"

"...mengambil sebuah keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan mempertimbangkan terlebih dahulu secara adil, untuk itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan..." Dengan menggunakan konsep harga yang setara dengan apa yang telah dikerjakan tak jauh beda dengan apa yang dikemukakan oleh Suhrawardi K. Lubis dengan Farid

Wajdi dalam buku Hukum Ekonomi Islam, bahwa perlunya campur tangan pemerintah untuk mengatur ketentuan upah.<sup>43</sup>

“...yang menjadi dasar pembolehan seputar masalah standar harga barang atau jasa oleh pemerintah ialah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *mudarat* dari masyarakat...” Jika pendapat tentang pengaturan harga barang dagangan merupakan pendapat yang *mu'tabar* (valid), maka dibolehkan mengadakan penentuan upah kerja sesuai kriteria yang dikemukakan Ibnu Taimiyah, dengan alasan hal ini sangat diperlukan dan berkaitan erat dengan kemaslahatan.

Meskipun ada perbedaan antar pendapat beberapa kalangan ulama terkait adanya campur tangan pemerintah dalam penetapan harga. Menurut Ibn Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah bahwa kebijakan penentuan harga dibolehkan, dengan beberapa kategori. Ada yang dikategorikan zalim dan haram, ada pula yang tergolong adil dan boleh. “...Apabila ketentuan tersebut bersifat merugikan dan menzalimi orang dan memaksa mereka untuk menjual sesuatu dengan harga yang tidak mereka setujui secara suka rela, atau menghalangi mereka untuk memperoleh keuntungan yang dihalalkan Allah, maka tindakan yang dilakukan tersebut termasuk haram...” namun sebaliknya jika ketentuan dan ketetapan itu bersifat adil demi kepentingan masyarakat, seperti memaksa mereka berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban mereka dengan imbalan yang layak dan melarang mereka melakukan sesuatu yang diharamkan atas mereka, seperti

---

<sup>43</sup> A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h.99.



menaikan harga dengan yang sesuai ketentuan nya, maka tindakan penguasa seperti itu adalah dibenarkan bahkan hukumnya wajib.

“...Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah yang berhubungan antar pihak yang memperkerjakan dengan pihak yang dikerjakan seperti membuat peraturan bahwa upah pekerja disesuaikan dengan beban berat kerja demi mencegah terjadinya pengeksploitasian terhadap kondisi buruh para pekerja...” namun juga tidak sampai dengan merugikan kemaslahatan pihak yang memperkerjakan demi menjaga modal yang bisa tetap tumbuh dan berkembang.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka Adalah ulasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang ada kemiripan objek atau permasalahan, yang sangat boleh jadi ada kaitannya dengan penelitian, jurnal, skripsi, tesis, distertasi.

1. Skripsi Ani Hidayati (2019) dengan Judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Praktek Upah-Mengupah antara Pemilik Kebun Sawit dengan Pemanen (Studi Kasus di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan)”. Tinjauan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan upah-mengupah antara pemilik kebun sawit dengan pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan upah-mengupah antara pemilik kebun sawit dan pemanen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui karena ada ketidaksesuaian upah-mengupah antara upah yang diberikan dengan kewajiban kerja sang pemanen tersebut, dimana sejatinya saat kita telah diberi

upah oleh seseorang disitulah kita harus mengerjakan sesuai apa yang telah orang tersebut berikan. Janganlah memakan upah tetapi kita tidak mengerjakan apa yang orang tersebut perintahkan. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan upah mengupah antara pemilik kebun sawit dengan pemanen sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah diatur oleh Fiqh Muamalah, namun dalam praktek pelaksanaan nya masih terdapat unsur-unsur kecurangan yang dilakukan oleh pemanen. Adapun pelaksanaan nya pemanen tidak memenuhi kewajibannya secara penuh seperti yang telah disepakati, sedangkan pemilik kebun telah memberikan upah kepada pemanen sudah sesuai seperti yang disepakati.<sup>44</sup>

2. Skripsi Anggun Destiani (2018) dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Jasa Taksi dengan Sistem Argo (Studi Kasus di Taksi Trans Lampung)”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan argo pada taksi Trans Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penetapan argo pada taksi Trans Lampung. Berdasarkan hasil temuan dilapangan didapati jawaban yang mengarah kepada penyalahgunaan dan permainan dalam pembayaran dengan sistem argo yang dilakukan oleh pihak supir yang tidak bertanggung jawab. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan supir Trans Lampung yaitu tidak adanya tarif tunggu yang dibuat oleh pihak perusahaan tetapi dilapangan para supir membuat tarif tunggu yang mengakibatkan konsumen merasa rugi karena tarif yang tertera pada mesin argo

---

<sup>44</sup> Ani Hidayati, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Praktek Upah-Mengupah antara Pemilik Kebun Sawit dengan Pemanen (Studi Kasus di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan)”

tidak sesuai yang dibayar sehingga konsumen membayar lebih dari harga yang tertera di tarif. Perusahaan taksi Trans Lampung tidak mengikuti peraturan-peraturan tentang penetapan tarif dasar dan tarif bawah yang telah dibuat oleh pemerintah dan telah di sah kan oleh Gubernur Lampung tentang adanya pembayaran tarif dengan sistem argo, sehingga terjadinya kecurangan, kecurangan tersebut tidakla dilaporkan kepada pihak perusahaan sehingga pihak perusahaan tidak dapat menindak oknum-oknum yang melakukan kecurangan.<sup>45</sup>

3. Skripsi Leny Shyntia (2018) dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus (Studi Kasus di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik pelaksanaan upah calo bus di Lingkungan Plaza Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 8 orang calo dan 1 orang bos calo. Tempat yang dijadikan kekuasaan mereka yaitu jalur arah ke kotabumi tepat nya di depan rumah makan minang dan Masjid Istiqlal. Penarikan upah calo kepada kondektur sudah ditentukan oleh calo yaitu Rp.2000 untuk jarak dekat dan Rp.5000 untuk jarak jauh. Sedangkan jalur arah Bandar Lampung atau tepatnya didepan Plaza Bandar Jaya tidak dijaga calo jadi bebas siapapun boleh menjadi calo dan tidak ada uang setoran kepada bos calo. Pelaksaan percaloan ini tidak ada kesepakatan tertulis, dimana kesepakatan tersebut sudah menjadi kebiasaan sehingga secara otomatis sudah

---

<sup>45</sup> Anggun Destiani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Jasa Taksi dengan Sistem Argo (Studi Kasus di Taksi Trans Lampung)”

menjadi kesepakatan. Namun ada beberapa kasus dimana para calo ini tidak bekerja namun meminta upah kepada kondektur bus dengan cara menimbulkan tindakan kekerasan.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Leny Shyntia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus (Studi Kasus di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan A Haris Abdullah, Semarang: Asy-syifa, 1990.
- A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah (Ayat-ayat Al-Quran yang Berdimensi Ekonomi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahsan W Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Chairumaan Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hadi Setia Tunggal, *Kumpulan Peraturan Pengawasan Ketenagakerjaan Edisi Lengkap*, Harvarindo, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hendrie Anto M.B, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ismail Muhammad.
- Iman Sjah Putra Tunggal, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pungantar*, Harvarindo, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Jus III*, terjemahan M.A. Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, Ekonisia UII, 2013.
- Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II.No.2443.Dar Ihya'al KutubArabiyah. 2009
- Moh Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Angkasa, 2006.
- Maman Abdul Djaliel, *Mazhab Syafi'i*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Moh. Nazir, *Metodelogi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.



Mustaq Ahmad , *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.

Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2015.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gaya Media, 2007.

Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sedarmayanti, Syarifuin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* Bandung: Mandar Maju, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sabiq As-sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid XIII* , Bandung: Al-Ma'aruf, 1987.

Sayyid Ahmad Al-Hasyim, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits (Hadis-Hadis Pilihan Berikut Penjelasannya)*, Terjemahan Moch Anwar dkk , Bandung: Sinar Baru, 1993.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIII* , Bandung: Al-Ma'aruf, 1987  
: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

.